

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 48

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 48 TAHUN2018

TENTANG

ANALISISSTANDARBELANJA

DENGANRAHMATTURANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 298 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap *disesuaikan* dengan kebutuhan ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Biaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan                    PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BABI  
KETENTUAN UMUM

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat *ASB* adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat *PPAS* merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Program adalah bentuk instrumen penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
16. Pengendalian belanja (cost driver) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendalian belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
17. Belanja Tetap adalah satuan pengendalian belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
18. Belanja Variabel adalah satuan pengendalian belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
19. Rumusan ASB rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja fixed cost dan variable cost.
20. Satuan Harga Barang Dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal2

Maksud ditetapkan *ASB* yaitu:

- a. menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran; dan
- b. sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal3

Penetapan *ASB* bertujuan:

- a. menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

## BAB III MUATAN *ASB*

### Pasal4

(1) Muatan *ASB* terdiri dari:

- a. definisi;
- b. rumusan *ASB*; dan
- c. alokasi objek belanja.

(2) Muatan *ASB* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BABIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal5

Indeks *ASB* dapat dilakukan perubahan Harga Standarisasi Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2018

U,

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR...[E].

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 48 TAHUN 2018  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018

ASB 001 - PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN KEAGAMAAN

DESKRIPSI:

Festival seni merupakan kegiatan-kegiatan dalam bidang seni dan budaya baik dalam bentuk festival, pementasan, lomba cipta dan lain sebagainya baik yang bersifat lokal maupun nasional dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan. Sedangkan, penyelenggaraan festival keagamaan merupakan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk menyemarakkan syiar keagamaan dan lebih menonjolkan keindahan dalam hubungan umat beragama. ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pentas seni dan agama, tetapi juga dapat diiringi dengan fasilitasi dan perlombaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan festival seni dan keagamaan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Jumlah orang, hari/kali kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp. 0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp. 305.238,56 per Partisipan per Hari/Kali/Kegiatan

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Perawatan kendaraan bermotor + Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya + Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu + Belanja Kursus, Pelatihan dan Bimtek PNS + Belanja Barang yang akan Diberikan/ Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat + Belanja Jasa Pertunjukan.

RUMUS PERBITUNGAN BELANJA TOTAL :

= BeJanja Tetap + BeJanja Variabel + BeJanja Tambahan

= Rp. 0,- + (Rp. 305.238,56 x jumlah orang partisipan hari/kali/kegiatan) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 001 :

No	Objek BeJanja	Rata-rata	BatasBawah	BatasAtas
1	Honorarium PNS	2,42%	0%	5,850/0
2	Honorarium Non PNS	2,71%	0%	6,55%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	24,70%	0%	58,94%
4	Belanja Jasa Kantor	28,12%	0%	66,40%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,80%	0%	6,50%
6	Belanja Makan dan Minum	32,30%	0%	74,54%
7	Belanja Sewa Rumahj Gedungj GudangjParkir	1,18%	0%	2,86%
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	5,76%	1%	10,74%

CONTOR RUANG LINGKUP KEGIATAN ASB 001 :

1. PenyeJenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan
2. Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar
3. Dll

## ASB 002 - PERINGATAN HARI-HARI PENTING NASIONAL DAN DAERAH

### DESKRIPSI:

Kegiatan peringatan hari-hari penting nasional dan daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah baik yang berskala nasional maupun daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari-hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat. ASB dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat.

Jumlah orang, hari kali kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp. 0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp. 206.519,47 per Orang per Kegiatan/Kali

BELANJA TAMBAHAN:

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu + Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + (Rp. 206.519,47 x jumlah orang x jumlah kegiatan/kali) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

ALOKASI OSYEK BELANJA ASB 002 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	2,60%	0/0	8,25%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	23,38%	0%	57,96%
3	Belanja Jasa Kantor	19,29%	0%	44,89%
4	Belanja Cetak dan Pengandaan	8,41%	0%	22,59%

5	Belanja Makan dan Minum	38,66%	0%	79,81%
6	Belanja Perjalanan Dinas	3,33%	0%	7,79%
7	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	3,48%	0%	7,83%
8	Belanja Sewa Kesenian dan Budaya	0,85%	0%	3,10%

CONTOH RUANG LINGKUP KEGIATAN ASB 002:

1. Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
2. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Peringatan hari nasional)
3. pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
4. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5. Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
6. Perayaan Hari Anak Yatim/Piatu
7. Dil

## ASB 003 - FORUM KOMUNIKASI/RAPAT/KOORDINASI

### DESKRIPSI:

Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Jumlah orang, hari/kali kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp. 0, per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp. 616.625,00 per Jumlah peserta per Jumlah hari pelatihan atau kali atau kegiatan (OKjOKg)

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Bahan Material + Belanja Peralatan Kendaraan Bermotor + Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya + Belanja Pakaian Kerja + Belanja Kursus Pelatihan Dan Bimtek PNS + Belanja Pemeliharaan + Belanja Konsultasi + Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0, + (Rp. 616.625,00 x jumlah orang partisipan x hari/kali kegiatan) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

ALOKASI OBJEK BELANJA ASB 003 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	14,61%	0%	95,6%
2	Honorarium Non PNS	0,51%	0%	3,35%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,09%	0%	11,74%
4	Belanja Jasa Kantor	22,87%	0%	108,37%

5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,74%	0%	10,99%
6	Belanja Sewa RumahL Gedungj Gudangj Parkir	1,02%	0%	5,03%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,54%	0%	11,12%
8	Belanja Makanan dan Minuman	18,09%	0%	71,12%
9	Belanja Perjalanan Dinas	32,47%	0%	250,61%
10	Belanja Sewa Kesenian dan Budava	0,07%	0%	0,53%

CONTOH RUANG LJ1fGKUP KEGIATAN AU 003 :

1. Validasi Data Base Kependudukan
2. Rapat kerja petani
3. Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Landasan Ulin
4. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
5. koordinasi pengembangan UKM
6. koordinasi bumd dan kajian investasi
7. koordinasi peningkatan kegiatan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah
8. koordinasi penanganan permasalahan sarana pra sarana perekonomian
9. Forum Konsultasi Publik RKPD
10. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wallikota
11. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
12. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
13. Koordinasi Program j Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kawasan Kumuh Perkotaan
14. Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat
15. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
16. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber DayaAir
17. kajianJ penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi
18. Jaringan Penelitian
19. Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan
20. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Tekhnologi
21. Raperda tentang APBD Pemerintah kota Banjarbaru yang tepat waktu
22. Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran APBD
23. Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Uang Daerah

24. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi Keuangan Daerah
25. Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
26. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
28. Surveilans Penyebab Kematian
29. Peningkatan Pencegahan/Pengendalian Kesehatan Jiwa
30. Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar
31. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Luar Negeri
32. Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
33. Koordinasi pemetaan Batas Wilayah Kota Banjarbar
34. Rapat Panitia Landreform
35. Rapat tim terpadu penanganan konflik sosial dan fkdms
36. Forum Lembaga Kerjasama Tripartit
37. Rapat Koordinasi Khusus Pajale
38. Pertemuan KWTtk kecamatan
39. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi
40. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
41. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
42. Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatjTokoh Agama
43. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
44. Kegiatan Reses
45. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
46. DialogjAudiensi Oengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
47. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
- 48.DII

## ASB 004 - KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN

### DESKRIPSI:

Kajian bersama/ diskusi/ sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan tidak sembarangan menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan kerja perangkat daerah harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Jumlah *orang*, hari/kaH kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp. 0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp. 718.952,50 per Jumlah peserta per Jumlah hari/kali/kegiatan (OH/OKjOKeg)

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Bahan/ Material

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + (Rp. 718.952,50 x Jumlah peserta per Jumlah hari/kali/kegiatan (OH/OK/OKeg)) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

**ALOKASI OBYEK BELAJA ASB 004 :**

No	Objek Belajar	Rata-rata	BatasBawah	BatasAtas
1	Honorarium PNS	3,15%	0%	9,44%
2	Honorarium Non PNS	9,76%	0%	29,29%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	25,75%	0%	64,26%
4	Belanja Jasa Kantor	27,05%	7,68%	46,41%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,19%	1,00%	17,39%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,630/0	00/0	1,900/0
7	Belanja Makanan dan Minuman	22,30%	11,36%	33,24%
8	Belanja Perjalanan Dinas	2,17%	0%	4,77%

**CONTOR RUANG LINGKUP KEGIATAN ASS 004 :**

1. Rembug tani
2. Pertemuan KTNA, gapoktan, koordinasi penyuluhan, rapat penyusunan program, dan RDKK
3. Rapat akses pangan masyarakat, Analisis Pengolahan data harga pangan pokok dan Rapat Harga Bahan Pokok
4. Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
5. Dll

ASB 005 - MONITORING/EVALUASI/PENGAWASAN/PELAKSANAAN

DESKRIPSI:

Monitoring/evaluasi/pengawasan/pengamatan adalah untuk mengawasi obyek tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Ruang lingkup ASB006 ini meliputi kegiatan evaluasi terhadap suatu obyek permasalahan atau kasus.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Jumlah obyek pemeriksaan (objek) pengawasan, jumlah kasus, jumlah lokasi pengawasan, jumlah dokumen pengawasan

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp. 0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp. 2.915.625,63 per Jumlah obyek pemeriksaan/kasus/lokasi/dokumen pengawasan

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Pakaian Kerja + Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + (Rp. 2.915.625,63 x Jumlah obyek pemeriksaan/kasus/lokasi/dokumen pengawasan) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 005 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	10,42%	0%	36,500/0
2	Honorarium Non PNS	0,25%	0%	1,73%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	9,07%	0%	25,45%
4	Belanja Jasa Kantor	21,74%	0%	66,21%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,33%	0%	12,12%
6	Belanja Makanan dan Minuman	15,11%	0%	33,97%

7	Belanja Perjalanan Dinas	38,08%	0%		208,79%	
---	--------------------------	--------	----	--	---------	--

CONTOH RUANG LINGKUP KEGIATAN ASB 005 :

1. Monitoring Penilik KeSatuan PNF
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Penatausahaan Data Kependudukan
4. Pengawasan Angkutan Orang dan Barang
5. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
6. Memonev kegiatan dinas lingkungan
7. Pengawasan Rencana Pembangunan
8. Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan
9. Monitoring dan evaluasi PAD lainnya yang sah
10. Penyelenggaraan Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Prestasi Kerja Aparatur
11. Pengawasan Dan Pembinaan Disiplin Disiplin Kerja PNS, PTT dan Tenaga Kontrak
12. Pengawasan dan Pendataan Alat UTTP
13. Monitoring Barang Kadaluarsa dan Terlaksananya Monitoring Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis
14. Uji Petik Standarisasi Produk
15. Monitoring PAD Dari Retribusi Pasar
16. Pengawasan Penggunaan Bahan Tambahan Makanan dan Minuman
17. Pendampingan Program Keluarga Harapan
18. Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barangjasa Pemerintah
19. Monitoring Objek Pajak dan Retribusi Daerah Serta Pendapatan Lain Yang Sah
20. Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD
21. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat
22. Peningkatan Penyehatan Lingkungan Air
23. Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
24. Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
25. evaluasi Peraturan Perundang- Undangan
26. Dll.

## ASB 006 - MENGIKUTI PAMERAN/EXPO

### DESKRIPSI:

Mengikuti Pameran merupakan kegiatan partisipasi OPD maupun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka menampilkan dan atau mengenalkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, hasil-hasil pembangunan, dan berbagai karya lainnya yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tertentu. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan. Selain itu juga, ASB ini mengatur kegiatan untuk mengikuti suatu pameran tertentu yang diselenggarakan oleh pihak lain.

### PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

1 kali pameran atau jika mengikuti pameran setara dengan 1 kali membuka stand pameran setara dengan 20 orang peserta yang mengikuti pameran.

1 kali pameran = 1 stand pameran = 20 orang peserta

### SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp. 0,- per kegiatan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp. 37.558.305,56 per 1 kali pameran atau per 1 stand pameran atau per 20 orang peserta

### BELANJA TAMBAHAN":

Belanja Bahan/Material+ Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

### RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + (Rp. 37.558.305,56 x I kali pameran atau per 1 stand pameran atau per 20 orang peserta) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

### ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 006 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	BatasBawah	BatasAtas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	16,98%	0%	44,87%
2	Belanja Jasa Kantor	16,04%	10,78%	21,30%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,59%	0%	5,47%

4	Belanja Sewa Rumahj Gedungj Gudangj Parkir	63,61%	27,29%	99,94%
5	Belanja Makanan dan Minuman	0,78%	0%	2,13%

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 006 :

1. Parneran Inacraft
2. Pameran Produk Nasional
3. Parneran Produk Industri
4. Dll

## ASB 007 - BIMBINGAN DAN PELATIHAN TEKIUS

### DESKRIPSI:

Bimbingan atau pelatihan masyarakat merupakan kegiatan yang memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu keahlian tertentu. Kegiatan ini secara penuh dilaksanakan oleh *OPD* dengan sasaran peserta adalah masyarakat umum.

Jumlah Peserta x Jumlah Kegiatan (Kali) atau Hari

SATUAN PENGENDALI BELAJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp. 0, per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELAJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp. 302.402,11 per peserta per hari/kali/kegiatan (OH/OK/OKeg)

BELAJA TAMBAHAN :

Belanja Bahan/ Material + Belanja Pakaian Kerja + Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu + Belanja kursus, pelatihan dan sosialisasi, bimtek PNS + Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga + Belanja Sewa Kesenian dan Budaya.

RUMUS PERHITUNGAN BELAJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0, + {Rp.302.402,11x peserta per hari/kali/kegiatan (OH/OK/OKeg) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

ALOKASI OBYEK BELAJA ASB 007 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	1,63%	0,000k	6,220k
2	Honorarium Non PNS	0,98%	0,00%	6,70%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	8,36%	0,93%	15,78%
4	Belanja Jasa Kantor	34,74%	0,00%	85,62%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,10%	0,05%	8,15%
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudan_gL_Parkir	0,22%	0,00%	1,52%

7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,01%	0,00%	6,54%
8	BeJanja Makanan dan Minuman	23,37%	0,00%	46,73%
9	Belanja Perjalanan Dinas	24,59%	0,00%	68,62%()

CONTOH RUANG LINGKUP KEGIATAN ASB 007 :

1. Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
2. Pembinaan Organisasi DWP
3. Pembinaan Organisasi Gatriwara
4. Pembinaan Organisasi perempuan
5. Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan
6. Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan
7. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
8. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar
9. Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
10. Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Cempaka
11. Pengembangan Sarana dan Prasarana Holtikultura
12. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertaniari/Perkebunan
13. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri
14. Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar
15. Pembinaan dan Pelatihan Bagi Anak Jalanan
16. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
17. Pembinaan Karang Taruna dan PekeIja Sosial Masyarakat
18. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
19. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
20. Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar
21. Pelaksanaan Rukun Kematian
22. Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
23. Fasilitasi Bantuan Sosial
24. Pembinaan dan Pengembangan UKS
25. Perencanaan, Koordinasi dan Pengembanan Usaha Kecil Menengah
26. Perluasan Akses Pasar bagi Produk UMKM
27. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat
28. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
29. Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat

30. Pengembangan Agribisnis Peternakan
31. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
32. Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Liang Anggang
33. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar
34. Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Banjarbaru
35. 011.

## ASB 008 - PERLOMBAAN

### DESKRIPSI:

Perlombaan merupakan perlombaan yang diikuti oleh kalangan masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu yang diadakan oleh satuan kelengkapan perangkat daerah.

### PENGEKDALIBELANJA (COSTDRTv .E~ :

Jumlah peserta, (orang)

### SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED* COS71 :

= Rp. 0,- per kegiatan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COS'II :

= Rp. 328.410,99per jumlah peserta

### BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Bahan/Material + Belanja Premi Asuransi + Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimtek PNS

### RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + Rp. 328.410,99x jumlah peserta) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

### ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 008 ;

No	Objek Beladja	Rata-rata	BatasBawah	BatasAtas
1	Honorarium PNS	0,17%	0,84%	0,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	27,24%	69,00%	0,00%
3	Belanja Bahan/ Material	14,73%	66,82%	0,00%
4	Belanja Jasa Kantor	28,85%	91,17%	0,00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,86%	14,35%	0,00%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,57%	11,84%	0,00%
7	Belanja Sewa Alat Berat	0,10%	0,61%	0,00%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,25%	17,95%	0,00%

9	Belanja Makanan dan Minuman	9,38%	20,98%	0,00%
10	BeJanja Perjalanan Dinas	5,85%	17,91%	0,00%

CONTOH RUANG LINGKUP KEGIATAN ASB 008 :

1. Bimbingan Teknis Kelompok UPPK
2. Pembinaan P2WKSS dan GSI
3. Lomba Kelurahan
4. Gelar Sosialisasi Tepat Guna ? Lomba dan sosialisasi
5. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SD
6. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SMP
7. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
9. Penyelenggaraan Lomba/ Pemilihan PI'K Berprestasi
10. Pengembangan Sekolah Berbasis karakter Bina SD
11. Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
12. peningkatan kreatifitas dan peran serta pemuda
13. pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
14. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
15. Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
16. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
17. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana 29
18. Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Puskesmas
19. Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
20. DU.

## ASB 009 - PENYUSUNAN LAPORAN YANG BERSIFAT KHUSUS

### DESKRIPSI:

Kegiatan penyusunan laporan yang bersifat khusus merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan laporan tertentu yang disusun dan dihasilkan oleh OPD tertentu yang telah menjadi kewenangan dan fungsinya. Laporan yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin, namun tidak diwajibkan untuk semua OPD. Contoh laporan yang bersifat khusus adalah LAKIP, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

### PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Jumlah Laporan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COS2*) :

= Rp. 0,- per kegiatan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COS1*) :

= Rp. 27.361.050 per Jumlah Laporan

### BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Bahan/ Material+ Belanja Pemeliharaan

### RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + (Rp. 27.361.050 x Jumlah Laporan) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

### ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 009 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	BatasBawah	BatasAtas
1	Honorarium PNS	19.22%	0%	98.16%
2	Honorarium NonPNS	0.04%	0%	0.23%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	8.56%	0%	18.31%
4	Belanja Jasa Kantor	31.30%	0%	87.63%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.14%	0%	27.21%

6	Belanja Makanan dan Minuman	8.05%	0%	20.18%
7	Belanja Perjalanan Dinas	21.70%	0%	81.65%

CONTOH RUANG LINGKUP KEGIATAN ASS 009 :

1. Penyusunan Laporan kependudukan dan KB
2. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Pendataan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Panga
4. Ketersediaan Pangan Masyarakat
5. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
7. Penyusunan Standar Satuan Harga
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
9. Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
10. Peningkatan Manajemen Sistem Penggajian PNS
11. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
12. Pengelolaan Data Kepegawaian
13. Pendataan dan Penataan Dokumerr/Arsip Daerah
14. Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa
15. Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah
16. Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah
17. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
18. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
19. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama
20. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
21. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
22. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
23. Pengawasan Inventarisasi Aset
24. Penanganan Kasus dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
25. Pembakuan Nama Rupa Bumi
26. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
27. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
28. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
29. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
30. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset./Barang

31. Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
32. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
33. Pendataan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
34. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
35. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
36. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
37. Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Standar Pelayanan Minimal
38. Penyusunan dan Pengumpulan Datal Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
39. Penyusunan dan Analisis Datal Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
40. koordinasi penyelenggaraan pemukiman kumuh
41. Dll.

## ASB 010 - SOSIALISASI PROGRAM DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

### DESKRIPSI:

Sosialisasi program dan penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung.

### PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Jumlah Peserta sosialisasi x Jumlah hari/kali/kegiatan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp. 0, per kegiatan

### SATUAN PENGELOMPOK BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp. 101.917,09 per orang per hari/kali/kegiatan

### BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Pakaian Kerja + Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu + Belanja Kursus, Pelatihan dan Bimtek PNS+ Belanja Pemeliharaan + Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga + Belanja Hibah/Bantuan Sosial Barang dan Jasa yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga Masyarakat

### RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0, + (Rp. 101.917,09 x jumlah peserta sosialisasi per hari/kali/kegiatan) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

### ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 010 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	BatasBawah	BatasAtas
1	Honorarium PNS	6,66%	00/0	28,310/0
3	Belanja Bahan Pakai Habis	28,63%	0%	103,35%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,16%	0%	31,57%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00%	0%	0,03%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,94%	0%	4,37%
7	Belanja Makanan dan Minuman	32,05%	0%	82,41%

Belanja Perjalanan Dinas	18,56%	0%	37,56%
--------------------------	--------	----	--------

CONTOR RUANG LINGKUP KEGIATAN ASB 010 :

1. Kesehatan reproduksi remaja
2. Kampungkb
3. Sosialisikesetaraan gender dalam pembangunan
4. Kotalayang anak
5. Pembinaan forum kerjasama pengendaliankependudukan
6. publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
7. Pembinaan dan pengawasan kelestarian sumber daya perikanan
8. peningkatan usaha pengolahan hasil perikanan
9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
10. Pengembanganinformasidan kemitraan pelaku usaha pertanian
11. Pengembanganusaha perkebunan
12. Pencegahankawasan pemukiman kurnuh
13. Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
14. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
15. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
16. Fasilitasi penanggulangan aids
17. Penyelenggara kesehatan kerja dan olahraga
18. Peningkatan pelayanan kesehatan status gizi masyarakat
19. Fasilitasi bantuan sosial
20. Pengendalian keamanan lingkungan
21. Sosialisasi peraturan/kebijakan pemerintah
22. Sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan
23. Sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara
24. Gugus tugas gerakan revolusimental
25. Penyuluhan kepada masyarakat
26. Sosialisasi perundang - undangan bantuan keuangan parpol
27. Sosialisasi perundang-undangan tentang pemilu
28. Rakor, raker, sosialisasi bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi
29. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
30. Pengembangan usaha kecil menengah
31. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
32. Penyuluhan perkoperasian

33. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
34. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
35. Sosialisasi upah minimum provinsi Kalimantan Selatan
36. Pembinaan dan penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan
37. Penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan
38. Pembinaan jaminan sosial
39. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
40. Pengembangan informasi dan kemitraan pelaku usaha pertanian
41. Pengembangan usaha perkebunan
42. Pembinaan kesehatan masyarakat veteriner
43. Pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonosis
44. Pembinaan dan pengawasan kelestarian sumber daya perikanan
45. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak masyarakat
46. Peningkatan usaha pengolahan hasil perikanan
47. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
48. Peningkatan kesehatan masyarakat
49. Peningkatan kesehatan masyarakat
50. Peningkatan kesehatan masyarakat
51. Peningkatan kesehatan masyarakat
52. Peningkatan kesehatan masyarakat
53. Peningkatan kesehatan masyarakat
54. Peningkatan kesehatan masyarakat
55. Terlaksananya sosialisasi pentingnya keberadaan dan fungsi satlinmas dalam masyarakat
56. Pembinaan dan penyuluhanj sosialisasi perda dan perwali
57. Pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat
58. Fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi publik
59. Pengelola dan pemanfaatan saluran komunikasi publik
60. Pelayanan permintaan informasi publik
61. Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik
62. Peningkatan pelayanan kesehatan status gizi masyarakat
63. DU.

## ASB 011 - APRESIASI KINERJA PERSONAL

### DESKRIPSI:

Apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu atau kepada lembaga. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan OPD yang bersangkutan, OPD lainnya ataupun masyarakat umum. Kegiatan ini mencakup perencanaan rincian kegiatan, penyusunan pendataan nominator, pemilihan dan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang layak menerima serta pertanggungjawaban kegiatan kepada pihak yang berwenang. Ruang lingkup kegiatan dalam ASB 017 dapat meliputi penghargaan terhadap penilaian jabatan fungsional, masa purna tugas, keteladanan dalam suatu pekerjaan atau bidang tertentu, dan lain sebagainya.

### PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Jumlah Penerima Penghargaan (orang)

### SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp. 0,- per kegiatan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp. 404.055,22 per Penerima Penghargaan

### BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Pakaian Kerja + Belanja Pengurangan Pegawai

### RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + (Rp. 404.055,22 x Penerima Penghargaan) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

### ALOKASI OBJEK BELANJA ASB 011 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium PNS	0,21%	-0,31%	0,73%
2	Honorarium Non PNS	0,00%	0,00%	0,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	33,83%	3,11%	64,56%
4	Belanja Jasa Kantor	32,88%	0,00%	72,32%

5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,06%	0,00%	7,90%
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	0,46%	0,00%	1,57%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00%	0,00%	0,00%
8	Belanja Sewa Alat Berat	0,00%	0,00%	0,00%
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,00%	0,00%
10	Belanja Makanan dan Minuman	27,55%	4,74%	50,37%

CONTOR RUANO LINOKUP KEGIATAN ASB 011 :

1. Penyelenggaraan Lomba/ Pemilihan PI'K Berprestasi
2. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir'.Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
3. Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalulintas
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Anggota Korpri
5. Pemberian Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
6. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Juru Parkir dan Pengelola Parkir
7. DU.

ASB 012 - WORKSHOP ATAU LOKAKARYA

DESKRIPSI:

Kegiatan workshop atau lokakarya adalah kegiatan atau acara yang dilakukan, dimana beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta workshop. Standar alokasi anggaran belanja bahan pakai habis pada kegiatan ini menggunakan dasar pemicu biaya (*cost drive*." tidak langsung atau *cost driver* antara.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) ANTARA :

.Jumlah orang, hari/kali kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp. 0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp. 1.164.902,30 per Jumlah orang, hari/kali kegiatan

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Bahan/Material + Belanja Pakaian Kerja + Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimtek PNS + Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Atau Pihak Ketiga

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + (= Rp. 1.164.902,30 x Jumlah orang, hari/kali kegiatan) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 012 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	BatasBawah	BatasAtas
1	Honorarium PNS	5,47%	0%	21,57010
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,79%	2,01%	11,56%
3	Belanja Jasa Kantor	34,00%	0%	86,38%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,38%	0%	10,85%
5	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ _Gudang/ Parkir	1,83%	0%	8,94%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,46%	0%	11,31%

7	Belanja Makanan dan Minuman	21,96%	0%	55,26%
8	Belanja Perjalanan Dinas	22,11%	0%	55,37%

CONTOR RUANG LINGKUP KEGIATAN ASB 012 :

1. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina SD
2. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina SMP
3. penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
4. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Isu Pendidikan Binas SD
5. Pengembangan Sekolah Berbasis karakter Bina SD
6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
7. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
8. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
9. Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
10. Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Cempaka
11. Pengembangan Sarana dan Prasarana Holtikultura
12. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Holtikultura
13. Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
14. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
15. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru
16. Dll.

## ASB 013 - ADMINISTRASI PENGADAAN KONTRUKSI

### DESKRIPSI:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pengadaan bangunan (sederhana, tidak sederhana, khusus), jalan, jembatan, irigasi, sungai dan pantai dan instalasi listriknya [utilitas).

### PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) ANTARA :

Nilai Konstruksi (X)

### SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp. 0,- per kegiatan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 1,1252 per Nilai Non-Konstruksi

### BELAKJA TAMBAHAN :

Honorarium Non PNS + Belanja Pemeliharaan + Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

### RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + (1,1252 + Nilai Non-Konstruksi) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah

### ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 013 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	BatasBawah	BatasAtas
1	Honorarium PNS	7,45%	0,00%	16,51%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,76%	0,00%	1,53%
3	Belanja Jasa Kantor	89,82%	0,00%	206,44%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	0,60%	0,00%	1,32%
5	BeJanja Makanan dan Minuman	0,76%	0,00%	1,53%
6	Belanja Perjalanan Dinas	0,61%	0,00%	1,52%

CONTOH RUANG LINGKUP KEGIATAN ASB 013 :

1. Pembangunan Jalan
2. Pembangunan Jembatan
3. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
6. Perbaikan Jalan Lingkungan
7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/ Shelter
9. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
10. Pengadaan Lampu Peringatan Jalan
11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
12. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah dan Sampah TPA
13. Dll

ASB 014 - PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKIITISAR  
REALISASI KINERJA

DESKRIPSI:

Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran SKPD yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dimulai dari persiapan kegiatan hingga *diserahkannya laporan*.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) ANTARA :

Jumlah Anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp. 0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp. 127.428,52 perJumlah Anggota tim penyusun

BELANJA TAMBAHAN :

Honorarium Non PNS + Belanja Jasa Kantor + Belanja Perjalanan Dinas

HUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp. 0,- + (Rp. 127.428,52 + Jumlah Anggota tim penyusun) + Belanja Tambahan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 014 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	BatasBawah	BatasAtas
1	Honorarium PNS	0,79%	0,00%	2,490/0
2	Belanja Bahan Pakai Habis	35,78%	0,00%	17,61%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,08%	0,00%	26,64%
4	Belanja Makanan dan Minuman	30,35%	0,000/0	34,810/0

CONTOR RUANG LINGKUP KEGIATAN ASB 014 :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11. Dil